PENERAPAN NILAI – NILAI KEARIFAN LOKAL BUGIS DALAM KEPEMIMPINAN CAMAT BARRU KABUPATEN BARRU

Sukmiah

STIA Al Gazali Barru
sukmiah@algazali.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanan penerapan nilai – nilai kearifan lokal Bugis dalam kepemimpinan Camat Barru Kabupaten Barru. Meode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif . Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Barru Kabupaten Barruyang dilakukan pada bulan Juni hingga Agustus 2019. Informan penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor Kecamatan Kecamatan Barru dan beberapa tokoh masyarakat. Sumber data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk pelaksanaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dengan jenis triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat Barru telah menerapkan nilai – nilai kearifan lokal Bugis dalam kepemimpinannya, berdasarkan nilai alempureng, amaccangeng, assitinajangen, agettengeng, dan reso.

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks sistem administrasi negara/ publik peran kepemimpinan menjadi sangat penting karena diyakini sebagai faktor penentu arah perjalanan suatu organisasi, intansi, dan lembaga. Faktor kepemimpinan merupakan determinan penting dalam organisasi karena kedudukannya dalam proses pencapaian tujuan bukan hanya sebagai objek yang sifatnya statis seperti layaknya faktor produksi lainnya tetapi juga sebagai subjek yang mengarah, pengatur dan pengendali terhadap semua sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Karena itu diperlukan peran kepemimpinan yang efektif. yang dapat ditujukkan dari kemampuan melaksanakan tugas dan fungsinya,

Hanya saja dewasa ini semakin sulit melihat dan menemukan karakter pemimpin yang bisa dipercaya dan dapat diandalkan oleh rakyat. Berbagai fenomena yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi contoh kondisi kepemimpinan kurang baik yang terjadi baik tingkat nasional maupun di daerah. Ironisnya pada saat pemerintah berupaya menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, di saat yang sama berbagai pelanggaran telah ditemukan. Penggunaan kekerasan, pemaksaan, manifulasi informasi untuk menyelesaikan masalah menjadi hal yang umum. Sudah menjadi hal yang biasa pemberitaan di media massa, berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh beberapa pemimpin atau pimpinan seperti : korupsi, kolusi dan nepotisme(KKN).

Hukum begitu jeli pada kesalahan tetapi buta pada keadilan. Tampaknya karakter masyarakat Indonesia yang santun dalam berperilaku, musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah, *local wisdom* yang kaya dengan pluralitas, toleransi dan gotong royong, telah berubah wujud menjadi hegemoni kelompok-kelompok baru yang saling mengalahkan. Apakah kearifan lokal yang kita miliki seolah punah, dan hilang fungsinya dalam membentuk karakter di masyarakat? (Ulfah Fajarini (2014)

1. Kepemimpinan

Soekanto, (2002: 280), mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang (pemimpin) untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang yang dipengaruhi bertingkah laku seperti yang dikehendaki oleh pemimpin. Kepemimpinan ada yang bersifat resmi (formal leadership) ada pula yang tidak resmi (informal leadership). Kemunculan seorang

pemimpin merupakan hasil dari proses dinamis memenuhi kebutuhan-kebutuhan kelompok

Menurut Siagian (2002), kepemimpinan merupakan individu yang menduduki suatu jabatan tertentu dimana individu tersebut memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mem-pengaruhi perilaku orang lain yakni bawahannya untuk berfikir dan bertindak sehingga melalui perilaku yang positif tersebut dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi.

Bass (1990: 21) dalam Andi Wahyudi1 dkk (2015) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu interaksi antara anggota suatu kelompok sehingga pemimpin merupakan agen pembaharu, agen perubahan, orang yang perilakunya akan lebih mempengaruhi orang lain daripada perilaku orang lain yang mempengaruhi mereka, dan kepemimpina itu sendiri timbul ketika satu anggota kelompok mengubah motivasi kepentingan anggota lainnya dalam kelompok.

Kepemimpinan merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain, begitu juga Ivancevich and Matteson (1999:409) dalam Teman Koesmono (2006; 347): *Leadership as the process of influencing others to facilitate the attainment of organizationally relevant goals,* untuk itu seorang pemimpin akan berinteraksi dengan kelompok serta situasi yang ada dalam organisasi. Secara skematis proses kepemimpinan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1

PROSES KEPEMIMPINAN

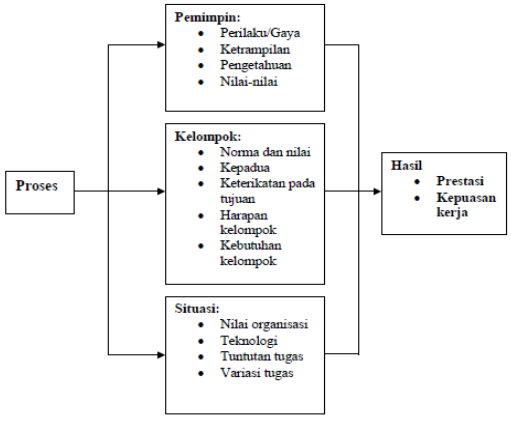

Sumber : Indriyo Gitosudarmo, Indriyo : Perilaku Organisasi, 2000; hal.128 dikutip oleh Teman Koesmono (2006: 347):

2. Kearifan Lokal

Menurut Rahyono, (2009). kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat1. Artinya, kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami

oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut.

Alfian, (1985:23) dalam Lintje Anna Marpaung (2013 ; 121) mengatakan bahwa kearifan dimulai dari gagasan-gagasan dari individu yang kemudian bertemu dengan gagasan individu lainnya, seterusnya berupa gagasan kolektif. Kearifan lokal ini biasanya dicipta dan dipraktikkan untuk kebaikan komunitas yang menggunakannya. Ada kalanya kearifan lokal itu hanya diketahui dan diamalkan oleh beberapa orang dalam jumlah yang kecil, misalnya desa. Namun ada pula kearifan lokal yang digunakan oleh sekelompok besar masyarakat, misalnya kearifan lokal etnik.

Kearifan lokal ini juga tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan masyarakat yang mendukungnya. Kearifan lokal, biasanya mencakup semua unsur kebudayaan manusia, yang mencakup: sistem religi, bahasa, ekonomi, teknologi, pendidikan, organisasi sosial, dan kesenian. Kearifan lokal bermula dari ide atau gagasan, yang kemudian diaplikasikan dalam tahapan praktik, dan penciptaan material kebudayaan. Ia akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, intensitas pergaulan sosial, dan enkulturasi sosiobudaya. Apalagi dalam dunia yang tidak mengenal batas seperti sekarang ini, kearifan lokal sangat diwarnai oleh wawasan manusia yang memikirkan dan menggunakannya.

Kearifan lokal juga dapat mendukung kepada keberadaan negara bangsa (*nation state*) tertentu. Bahkan dalam merumuskan sebuah negara bangsa, selalunya diwarnai oleh kearifan-kearifan lokal yang tumbuh dalam masyarakat yang membentuk dan mencita-citakan negara bangsa tersebut. Misalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mempunyai dasar negara Pancasila, sebenarnya adalah proses pemikiran para pendiri bangsa ini untuk membuat dasar negara yang diambil dan digali dari nilai-nilai kearifan lokal Nusantara. Kearifan-kearifan lokal ini kemudian dirumuskan menjadi lima sila yang berdasar kepada bentuk "ikatan sosial budaya" biar berbeda-beda tetapi tetap satu (*bhinneka tunggal ika*).. *Von Savigny* menyatakan bahwa Hukum merupakan volgeist dari ,jiwa rakyat yang tidak mudah

diterjemahkan melalui pembuatan hukum sekalipun (Azyumardi Azra, 2007: 34) dalam Lintje Anna Marpaung (2013 ; 121)

Palengkahu dkk, (1971) dalam Pawennari Hijjang. (2002: 255) Daerah Sulawesi Selatan merupakan salah adalah satu daerah di Indonesia yang memiliki fenomena sosial dan kebudayaan yang khas dan beraneka ragam. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini bahwa di daerah initerdapat empat suku bangsa yang utama (Bugis,Makassar, Toraja dan Mandar) dengan limakelompok bahasa yakni, bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Toraja, bahasa Mandar dan bahasa Massenrempulu, serta dua puluh empat (24) sub kelompok bahasa daerah yang masing-masing memiliki dialek tersendiri.

3. Kepemimpinan Berkearifan Lokal Bugis

Sejak dahulu kala, budaya masyarakat Sulawesi Selatan sudah tercatat di dalam literatur kuno orang Bugis (juga Makassar) yang disebut dengan *"Lontarak"*, yang di dalamnya terdapat ajaran-ajaran yang menceritakan tentang asal muasal kejadian manusia, terjadinya kerajaan, aturan-aturan kehidupan manusia, dan lain-lain. Sejak zaman pra Islam sampai sekarang hal hal tersebut dapat diungkapkan melalui sumber-sumber tertulis sejak abad XIV M. hingga diterimanya Islam sebagai agama yang dianut oleh masyarakat pada awal abad XVII M. Dalam kurun waktu tersebut, sumber yang melukiskan keadaan masyarakat Bugis tersebut hanyalah Lontarak (Mattulada, tahun III: 76).

Menurut Rahim, (2011: 120-144). Masyarakat Bugis, sejak dahulu dikenal memiliki sistem kehidupan dan tata nilai yang mereka pedomani dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat. Nilai-nilai utama kebudayaan Bugis itu meliputi kejujuran (lempu'), kecendekiaan (amaccang), kepatutan (assitinajang), keteguhan (agettengeng), usaha (reso), prinsip malu (siri') Nilainilai tersebut diwariskan oleh leluhur Bugis melalui Papangngaja (nasihat) dan Paseng (amanat).

Menurut Hamid (2001: 41) dalam Bustan (2015; 68 - 69) bahwa Berbagai nilai yang terkandung dalam pemikiran intelektual Bugis mencerminkan kecerdasan dan kearifan lokal yang memberi semangat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh cendikiawan Arung Bila dan Kajaolaliddong bahwasanya ada lima macam permata bercahaya (sifat) yang harus dimiliki seorang pemimpin, yakni: *Lempu'e nasibawangi tau', ada tongengnge nasibawangi tike', siri'e nasibawangi getteng, akkalenggnge nasibawangi nyamekkininnawa, awaraningeng nasibawai cirinna. artinya* Kejujuran disertai takut/ takwa, perkataan yang benar disertai waspada, siri/harga diri yang disertai dengan ketegasan, kecerdasan yang disertai dengan hati, keberanian yang disertai dengan kasih-sayang (Hamid, 2001: 41).

Dari uraian tersebut jelas, bahwa seseorang yang ingin diangkat menjadi pemimpin/ penguasa harus memiliki sifat keteladanan untuk menegakkan lempu' (kejujuran), bicara (berkata) dengan benar, siri' (menjaga harkat dan martabat) pada masyarakat atau rakyatnya, memiliki acca' (kecerdasan) dalam mengatur sistem pemerintahan, getteng (tegas) dalam kebijakannya dan harus warani' (berani) menegakkan keadilan dengan tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya atau tidak pandang bulu.

Hal tersebut dibuktikan oleh Arumpone La Tenrirawe Bongkangnge (± 1560-1578) sebagai raja di Kerajaan Bone. Pada masa pemerintahannya ia dikenal sebagai raja yang sangat memegang teguh ade' (adat), sehingga menjadikannya raja yang sangat disegani oleh rakyat. Kehidupan rakyat digambarkan dengan suasana damai tanpa banyak perselisihan yang terjadi, karena raja turut menangani langsung kalau ada rakyatnya yang bermasalah. (Bustan (2015; 70).

Muhtamar, (2007: 17). dalam (Bustan (2015; 70). bawa Nilai-nilai budaya masyarakat Bugis sangat memegang teguh tentang konsep yang dikenal yakni.

1. *Lempu (Kejujuran)* bahasa Bugis artinya sama dengan lurus sebagai lawan dari bengkok. Dalam berbagai konteks adalah kalanya kata ini berarti ikhlas, benar, baik atau adil, sehingga lawannya adalah culas, curang, dusta, khianat, seleweng, buruk, tipu dan sejenisnya. Sejalan dengan pengertian tersebut cendikiawan Bone Kajaolaliddong menjelaskan kejujuran ketika ditanya oleh

Raja Bone tentang dasar-dasar keilmuan. Menurutnya bukti dari kejujuran adalah :

a. Jangan mengambil tanaman yang bukan tanamanmu
b. Jangan mengambil barang-barang yang bukan barang-barangmu,bukan juga pusakamu
c. Jangan mengeluarkan kerbau dari kandangnya, yang bukan kerbaumu
d. Jangan mengambil kayu yang disandarkan, yang bukan kau yang menyandarkannya
e. Jangan juga kayu sudah ditetak ujung pangkalnya, yang bukan engkau yang menetaknya (Muhtamar, 2007: 17).

2. *Acca' (Kecendikiaan),* nilai kecendikiawan sering dipasangkan dengan nilai kejujuran, karena keduanya saling mengisi. Cendikia atau intelek dalam bahasa Bugis biasa disebut acca. Dalam konsep kecendikiawan terkandung nilai kejujuran, kebenaran, kepatutan, keikhlasan dan semangat penyiasatan atau penelitian. Acca juga diartikan pintar, dalam arti memiliki kemampuan intelektual yang baik.
3. *Assitinajang (kepatutan),* dapat diartikan sebagai pantas dan kelayakan. Nilai kepatutan ini erat hubungannya dengan nilai kemampuan baik secara jasmanih maupun rohanih. Penyerahan atau penerimaan sesuatu, apakah itu amanat atau tugas, haruslah didasarkan atas kepatutan dan kemampuan. Nilai kepatutan dapat dalam diri La Taddampare' Puang Rimaggalatung yang mengatakan: "Jangan serakahi kedudukan, jangan pula terlalu inginkan kedudukan tinggi, kalau kamu tidak mampu juga memperbaiki negeri. Nantilah bila dicari baru kamu muncul, nantilah bila ditunjuk baru kamu mengia" (Muhtamar, 2007: 22)
4 *Getteng (Ketegasan),* dalam bahasa Bugis berarti keteguhan. Orang yang memegang nilai keteguhan ialah orang menepati untuk tidak mengerjakan ketidak-baikan, dan berketetapan melakukan kebaikan, meski keburukan itu menarik hatinya tetapi sudah diketahuinya tentang keburukan, lalu tidak

dilakukannya. Nilai keteguhan terikat pada makna yang positif, sebagaimana yang dikemukakan oleh To Ciung bahwa ada empat perbuatan nilai keteguhan yakni: Pertama, tidak mengingkari janji, kedua tidak mengkhianati kesepakatan, ketiga tidak membatalkan keputusan, tidak mengubah keputusan, keempat, jika berbicara dan berbuat tidak berhenti sebelum rampung.

Hal tersebut menerangkan, bahwa perlunya menegakkan ketegasan dengan selalu menepati janji yang sudah dikatakan. Berkata dengan sejujurnya dengan tidak membatalkan dan mengubah sesuatu yang sudah disepakati bersama antara penguasa dengan rakyat dan bekerja maksimal untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan sekelompok golongan atau pribadi.

5. *Warani (Ksatria),* Seorang pemimpin seharusnya memiliki sifat warani yang bermakna berani mengambil tindakan untuk menjaga kestabilan pemerintahan. Keberanian sangat diperlukan dalam pemerintahan karena apabila seorang pemimpin tidak warani, maka dengan mudah dipengaruhi oleh orang lain atau lebih jauh oleh bawahannya. Konteks warani berarti berani bertindak dan berani mengambil resiko. Begitulah seorang pemimpin dalam suatu lembaga pemerintahan.
6. *Masagena (Kemampuan),* Nilai kepatutan erat kaitannya dengan kemampuan (makamaka) jasmaniah dan rohaniah, Penyerahan atau penerimaan sesuatu harus didasarkan pada kepatutan dan kemampuan. Makamaka lebih banyak menekankan penampilan bagi pemangku tanggung jawab. Perkataan terima kasih adalah kata pinjaman dalam bahasa Bugis. Sebelumya bila orang menerima sesuatu dari seseorang, maka yang menerima mengucapkan gembira atau senang. Misalnya dikatakannya *"marennu, temmaka rennuku"* gembira alangkah gembira saya. Kemampuan disini juga bermakna bahwa seorang calon pemimpin itu seharusnya memiliki kecukupan harta atau kekayaan.
7. *Makaritutu (Kewaspadaan),* dapat

dimaksudkan bahwa seoramg pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan hendaknya berhati-hati. Jangan sampai organisasi yang dipimpin dibawa pada hal-hal negatif bukan pada hal-hal yang positif. Misalnya adanya kecenderungan KKN, menghalalkan segala cara dalam mencapai suatu tujuan dan sebagainya. Untuk itu diperlukan seorang pemimpin yang mampubertanggung jawab dan sifat kehati-hatian dalam setiap tindakannya.

Kemudian nilai-nilai kearifan lokal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai-nilai yang sangat dutamakan dalam masyarakat Bugis yang dijadikan pegangan baik dalam kepemipinan maupun dalam kehidupan. Nilai-nilai keariffan lokal yang dimaksud seperti yang dijelaskan oleh Rahim (2011), yaitu:

(1) Alempureng (kejujuran). "lempu' sama dengan lurus sebagai lawan dari bengkok. Dalam berbagai konteks, adakalanya kata ini juga berarti ikhlas, benar, baik atau adil (Matthes dalam Rahim, 2011: 119);

(2) Amaccang, (Kecendikiaan), " acca" bukan pandai atau pintar tetapi cendekia atau intelek. (Rahim . 2011: 126)

(3) Assitinajang (kepantasan), Kata ini berasal dari kata sitinaja yang berarti cocok, sesuai, pantas atau patut (Matthes dalam Rahim, 2011: 129);

(4) Agettengeng (keteguhan) "getteng" dalam, selain berarti teguh, juga berarti tetap pada asas atau setia pada keyakinan, kuat dan tangguh dalam pendirian, erat memegang sesuatu (Machmud dalam Rahim, 2011: 132-133);

(5) Reso(usaha) adalah nilai kunci bagi pelaksanaan nilai-nilai kejujuran (Rahim . 2011: 135-136)

4. Kecamatan

Pada level pemerintahan di kecamatan dipimpin oleh seorang camat . Camat adalah representasi dari sebuah wilayah kecamatan yang dipimpinnya, dimana majunya suatu daerah kecamatan tentu tidak terlepas dari seorang pemimpinnya. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) sangat ditentukan oleh peran pemimpin, termasuk

camat karena pemimpin adalah pendesaian sebuah kegiatan sebelum dilaksanakan oleh bawahan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan pada pasal 10 dijelaskan bahwa tugas dalam memimpin Kecamatan bertugas:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
    1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
    2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
    3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
    4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
    1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
    2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
    3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
    1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
    2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan

peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
   1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
   2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
   3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
   1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
   2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan kegiatan vertikal kegiatan
   3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
   1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
   2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
   3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
   4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayana kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan pada pasal Pasal 11 ijelaskan bahwa :

1. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/ wali kota:
   a. untuk melaksanakan sebagian urllsan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
   b. untuk melaksanakan tugas pembantuan.
2. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.
3. Pelayanan perizinan sebagai-mana dimaksud pada ayat l2l dilaksanakan dengan kriteria:
   a. proses sederhana;
   b. objek perizinan berskala kecil;
   c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
   d. tidak memerlukan teknologi tinggi.
4. Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan terpadu.
5. Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan dengan kriteria:
   a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
   b. kegiatan berskala kecil; dan
   c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
7. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat.

8. Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan lebih ianjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Kirk dan Miller (Moleong, 2011:4) dinyatakan bahwa ”penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya”. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Barru Kabupaten Barru yang dilakukan pada bulan Juni hingga Agustus 2019. Informan penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor Kecamatan Kecamatan Barru dan beberapa tokoh masyarakat. Sumber data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk pelaksanaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dengan jenis triangulasi sumber.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemajuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) sebagai bagian dari globalisasi telah merubah tatanan kehidupan sosial termasuk perubahan nilai- nilai kepemimpinan. Perubahan tersebut membawa kecenderungan membuat silau akan kemajuan yang pada akhirnya melupakan identitas nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki.

Berdasarkan temuan di lapangan melalui beberapa wawancara dengan informan terkait dengan camat Barru, maka dapat disedkripsikan yakni:

1. Nilai *alempureng* dapat dilihat dari kepemimpinan camat yang dapat dipercaya. yaitu adanya kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kepemimpinan camat tulus dalam setiap kerja yang dilakukannya. Dimana dalam melakukan suatu tindakan camat dalam kepemimpinannya berbuat dari lubuk hatinya sendiri bukan

semata - mata karena tuntutan kerja. Seperti gaji yang diterima oleh staf sesuai besarannya tanpa ada potongan sedikitpun. Selain itu camat Barru dapat dinilai sebagai pemimpin yang memilki kepedulian cukup tinggi. Sepeti ketika pegawai mempertanyakan gaji yang terlambat, maka camat secepat mungkin bertindak menghubungi pihak terkait. Kemudian meskipun dalam kesibukan, dengan ikhlas tetap menyempatkan diri membesuk sataf atau masyarakat yang sakit.

2. Kepemimpinan camat yang memiliki *acca* dapat dilihat dalam kemampuannya memecahkan masalah yang terjadi dalam organisasi yang dipimpinnya. Dalam hal ini Camat Barru dalam kepemimpinannya ketika mendapati adanya masalah maka segera mengadakan rapat musyawarah untuk memediasi antar pihak yang berselisih agar masalah tersebut dapat diselesaikan. Kemudian dalam membuat suatu perencanaan, terlebih dahulu mencari informasi yang tersedia, membuat rencana yang tepat dan dapat terlaksana sehingga mampu membuat keputusan yang tepat.

   Kepemimpinan camat yang memiliki acca dapat pula dilihat dari perhatiannya terhadap target dari organisasi yang belum terealisasi. Dalam hal ini Camat Barru menunjukkan sikap acca dengan tetap tekun dan sabar untuk memberikan motivasi dan semangat pegawainya serta tetap menjaga kualitas kinerja mereka. Kemudian dalam menyampaikan tugas pada bawahannya, Camat Barru menggunakan bahasa yang santun, jelas dan mudah dimengerti.

3. Nilai *Assitinajang*, dapat dilihat dari kemampuaannya memposisikan para pegawai-nya dengan baik sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Dimana hal ini bisa dilihat dari kepemimpinan camat yang mampu mengatur job description sesuai dengan jabatan dan fungsinya yang ada di kecamatan. Kepemimpinan camat yang memiliki nilai asitinajang berarti mampu memanage kecamatan dengan baik yang merupakan kewajiban

utama dari seorang camat. Kemampuan camat mengatur segala sesuatu dalam ruang lingkup Kantor kecamatan sangatlah berkaitan erat dengan kemampuan manajerial seorang camat. Kemudian dalam hal konteks ini Camat Barru ketika mendelegasikan tugasnya sudah sesuai dengan jabatan pegawai yang menjadi bawahannya pada tiap kasi yang ada di Kantor Kecamatan . Saat mendelegasikan tugas, tetap dalam sikap yang santai dalam memberikan pengarahan tetapi tetap fokus dan jelas dengan apa yang hendak disampaikan.

Camat Barru dalam melakukan tugas senantiasa melakukan penilaian terhadap kinerja para pegawainya sesuai dengan standar prosedural yang berlaku. dari aspek ini camat Barru dimana sering mengawasi kinerja bawahannya serta mengarahkannya dalam rapat koordinasi. Camat juga melakukan penilaian terhadap perilaku kerja bawahannya apakah sudah sesuai standar atau belum. Sehingga dapat pula dikatakan penerapan nilai asitinajang dalam konteks meletakkan sesuatu pada tempatnya telah berjalan dengan baik.

Kemudian kepemimpinan camat harusl mampu menjadi pemimpin yang amanah. Dapat dilihat dari pemimpin yang menyalurkan bantuan sesuai tingkat kemampuan penghasilan warganya.

4. Nilai *Agettengeng* (keteguhan), Pemimpin yang teguh pada pendirian akan terus menjaga dan mengarahkan dan tetap konsisten untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Tidak semua upaya yang telah dilakukan camat dalam menjalankan kepemimpinannya menuai hasil yang baik. Pada kondisi inilah dibutuhkan peran kepemimpinan camat untuk bersikap getteng agar tidak mudah putus asa melihat hasil yang adaserta terus berusaha memotivasi bawahan dalam mencapai tujuan organisasi agar tidak mudah menyerah dan menjadi tantangan sebagai hal yang biasa.

   Kemudian nilai *agettengeng* pada kepemimpinan camat dapat dilihat dari sikap menepati janji. Apabila ia mengatakan akan melaksanakan sesuatu maka hal tersebut haruslah dilaksanakan. Camat Barru selalu berusaha menepati apa yang telah

diucapkannya sebagai janji dengan baik. Kepemimpinan camat yang memiliki nilai *agettengeng* tidaklah plin- plan dalam kinerjanya. Kemudian ketika sudah menjadi keputusannya, maka keputusan itulah yang akan dilaksanakan dan dipegang teguh. Siapapun bawahan yang melanggar kode etika kepegawaian akan ditegur, meskipun dengan bahasa dan mimik yang menunjukkan adab sopan santun. Sebaliknya pegawai yang menunjukkan kinerja yang baik dan berprestasi khususnya dari aspek kinerja pelayanan akan diapresiasi.

Selain itu camat Barru memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta berusaha mencegah hal- hal yang sekiranya dapat mengganggu tercapainya tujuan, terutama dalam pelayanan publik. Dari aspek ini Camat Barru ditunjukkannya dengan memberi nasehat pada bawahan agar ramah, dan cepat dalam melayanani kepentingan masyarakat agar kualitas pelayanan semakin baik dan masyarakat semakin puas.

5. Nilai *Reso* (Usaha). Kepemimpinan camat sebaiknya pula memperhatikan nilai reso sebagai nilai usaha dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam hal ini Camat Barru melakukan usaha dalam membangun Kecamatan Barru melalui kerjasama baik yang dilakukan dengan pihak instansi lain maupun dari kalangan swasta. Usaha yang dilakukan ini dimaksudkan agar dapat ikut mengembangkan kualitas organisasi kecamatan Barru yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini dilakukan Camat Barru karena meyakini dan menerapkan prinsip *reso* kearifan lokal, yaitu "Resopa Temmangingi Malomo Nalompengi Pammase Desata" (hanya dengan usaha yang gigih akan mendatangkan berkah dari Tuhan)

D. KESIMPULAN

Dari berbagai penjelasan di atas yang dikaji sesuai dengan tujuan penelitian terkait, maka dapat disimpulkan bahwa nilai – nilai kearifan lokal dalam kepemimpinan Camat Barru telah diterapkan dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya sebgaimana mestiya : Dapat dideskrifsikan, yakni :

1. Nilai *Alempureng*, Camat Barru telah menunjukkan nilai kejujuran, dengan sesuainya ucapan dengan tindakan, tulus dalam menjalankan tugas, dan memilki kepedulian baik pada staf, maupun pada masyarakat setempat.
2. Nilai *Amaccangeng*, Camat Barru telah menunjukkan kepemimpinannya dalam menangani permasalahan masyarakat. Kemudian dalam membuat suatu perencanaan, mampu, membuat rencana yang tepat dan dapat terlaksana sehingga mampu membuat keputusan yang tepat. Camat Barru menunjukkan sikap acca dengan tetap tekun dan sabar untuk memberikan motivasi dan semangat pegawainya serta tetap menjaga kualitas kinerja mereka
3. Nilai *Assitinajang*, Camat Barru dapat dilihat dari kemampuaannya memposisi-kan para pegawainya dengan baik sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu Camat Barru dalam melakukan tugas senantiasa melakukan penilaian terhadap kinerja para pegawainya sesuai dengan standar prosedural yang berlaku. Kemudian kepemimpinan camat harusl mampu menjadi pemimpin yang amanah ditunjukkan ketika menyalurkan bantuan sesuai tingkat kemampuan penghasilan warganya.
4. Nilai *Agettengeng* (keteguhan), Camat Barru bersikap getteng agar tidak mudah putus asa melihat hasil yang ada serta terus berusaha memotivasi bawahan dalam mencapai tujuan organisasi agar tidak mudah menyerah dan menjadi tantangan sebagai hal yang biasa. Dapat dilihat dari sikap menepati janji. Apabila ia mengatakan akan melaksanakan sesuatu maka hal tersebut haruslah dilaksanakan. Camat tidak plin-plan meskipun seorang perempuan. Siapapun bawahan yang melanggar kode etika kepegawaian akan ditegur, Sebaliknya pegawai yang menunjukkan kinerja yang baik dan berprestasi khususnya dari aspek kinerja pelayanan akan diapresiasi
5. Nilai *Reso*, Camat Barru telah melakukan usaha dalam membangun Kecamatan Barru melalui kerjasama baik yang dilakukan dengan

pihak instansi lain maupun dari kalangan swasta. Camat Barru telah menerapkan prinsip reso kearifan lokal, yaitu "Resopa Temmangingi Malomo Nalompengi Pammase Desata" (hanya dengan usaha yang gigih akan mendatngkan berkah dari Tuhan)

DAFTAR PUSTAKA

Andi Wahyudi1 dkk .2015. *Penerapan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Kepemimpinan Camat Di Kantor Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar*. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Agustus 2015 Volume 1 Nomor 2

Bafadal, Ibrahim, 2003. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar SentalisasiMenuju Desentralisasi*. Jakarta, Bumi Aksara

Bustan .2015. *Reinterpretasi Demokrasi Dalam Kepemimpinan Tradisional Bugis Yang Berkearifan Lokal Menuju Revolusi Mental* . Seminar Nasional "Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015".Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia. Dosen Fakultas Ilmu sosial UNM

F.X, Rahyono. 2009. *Kearifan Budaya dalam Kata.* Jakarta: Wedatama Widyasastra.

Hamid, Abu dkk. 2007. Sejarah Bone. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone

Lintje Anna Marpaung (2013 . *Urgensi Kearifan Lokal Membentuk Karakter Bangsa Dalam*

*Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah***.** Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. *Yustisia Vol.2 No.2*

Mattulada. tahun III. *Sulawesi Selatan Pra Islam dalam Bultetin Yaperna*. No. 12.

Muhtamar, Shaff. 2007. *Masa Depan Warisan Luhur Kebudayaan Sulsel. Makassar* : Pustaka Refleksi.

Moeleong, Lexy.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Noordyun, J. 1995. *Historiografi Indonesia sebuah pengantar*. Jakarta : Gramedia.

Pawennari Hijjang. 2002**.** *Pasang* dan Kepemimpinan Ammatoa: Memahami Kembali Sistem Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Kajang Sulawesi Selatan

Rahim, A. Rahman. 2011. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis. Yogyakarta*: Penerbit Ombak.

Siagian, S. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Soekanto, S., 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press Bambang*

Yudoyono, 2001, Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Ulfah Fajarini .2014. *Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter*. Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta. Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 2.

Teman Koesmono .2006. *Peranan Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Perilaku Karyawan*. Ekuitas Vol.10 No.3 September 2006 Issn 1411-0393.

Sumber Lain.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan